

PENGARUH KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MELALUI BANTUAN SOSIAL, INSENTIF PAJAK, DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MALANG

Shalung Asyefa Haqon

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: shalungasyefa@icloud.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan sosial, insentif pajak, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan dinas terkait, serta publikasi umum lainnya. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kebijakan pemulihan ekonomi di Kota Malang.

Dalam menunjukkan bagaimana pengaruh kebijakan pemulihan ekonomi nasional terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang dalam penelitian ini, digunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah $Y = 4181842,9 + 138,564X_1 - 5,42X_2 + 2932,287X_3 + e$. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel bantuan sosial dan investasi secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang, sedangkan variabel insentif pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, secara simultan kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan sosial, insentif pajak, dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.

Kata Kunci : Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bantuan Sosial, Insentif Pajak, dan Investasi

PENDAHULUAN

Munculnya virus corona atau Covid-19 di Kota Wuhan, China, pada akhir tahun 2019, telah menyebar luas ke berbagai negara lain. Hal ini dikarenakan virus tersebut dapat menular dengan mudah melalui droplet yang ada di udara. Virus COVID-19 telah menginfeksi jutaan orang di dunia dengan gejala yang beragam, bahkan ratusan ribu orang yang terjangkit telah meninggal dunia. Pada bulan Maret tahun 2020, World Health Organization (WHO) telah menetapkan status Covid-19 menjadi pandemi karena peningkatan jumlah kasus yang sangat drastis (Widodo & Ardiani, 2022).

Penyebaran virus yang sangat cepat membuat banyak negara menutup akses kunjungan dari warga negara asing, tidak terkecuali dengan Indonesia. Namun, virus tersebut terlebih dulu masuk ke Indonesia dan pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mendeklarasikan darurat nasional bersamaan dengan menyebarnya virus tersebut di Provinsi DKI Jakarta dan meluas hingga ke provinsi lain. Melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020, presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional sekaligus membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Antisipasi penyebaran dilakukan pemerintah melalui pembatasan interaksi sosial masyarakat melalui Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut diberlakukan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah padat penduduk dan wilayah dengan mobilitas sosial yang tinggi. Masyarakat yang terpapar virus, harus melakukan isolasi dan membatasi jarak atau physical distancing dengan orang lain. Melalui media elektronik, pemerintah menyampaikan informasi seputar gejala-gejala pada orang terpapar sehingga masyarakat yang merasakan gejala tersebut dapat segera melakukan isolasi mandiri. Namun, penyebaran virus ini terus meluas dan semakin tidak terkendali, sehingga banyak fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang penuh. Kemudian, pemerintah mengambil kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat melalui Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kebijakan PPKM membatasi seluruh kegiatan masyarakat mulai dari bekerja, bersekolah, hingga kegiatan lainnya. Pemerintah menghimbau agar proses pembelajaran pada lembaga pendidikan dilakukan dalam jaringan (daring) dan kegiatan bekerja dilakukan melalui rumah atau yang biasa dikenal dengan Work From Home (WFH). Selain itu, mobilitas sosial masyarakat sangat

dibatasi. Masyarakat dilarang bepergian jauh, terlebih dengan transportasi umum. Untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini, pemerintah turut membatasi jam operasional tempat hiburan, tempat makan, dan tempat belanja. Bahkan beberapa tempat wisata terpaksa ditutup sementara agar tidak menyebabkan kerumunan. Akibatnya, masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah (Ilmy, 2022)

Pembatasan secara masif yang dilakukan pemerintah memiliki konsekuensi pada perekonomian. Hasil survei Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2020, mengemukakan bahwa 88% perusahaan terdampak pandemi. Pembatasan menyebabkan turunnya permintaan dan melambatnya aktivitas produksi. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja karena penjualan yang menurun dan harus dilakukan efisiensi biaya. Aktivitas produksi yang terhambat dan menurun menyebabkan terjadinya kelangkaan pada beberapa barang sehingga terjadi kenaikan harga barang. Kelangkaan barang juga disebabkan penimbunan yang dilakukan masyarakat akibat perilaku panic buying. Padahal, pendapatan masyarakat banyak yang menurun akibat pengurangan jam kerja, pemutusan hubungan kerja, dan penutupan usaha akibat gulung tikar maupun himbuan untuk tutup sementara oleh pemerintah. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun.

Daya beli masyarakat yang terus menurun berbanding lurus dengan tingkat konsumsi dan sebagai konsekuensinya, pergerakan ekonomi tidak berjalan stabil. “Ketika permintaan agregat tidak cukup untuk memastikan penyerapan tenaga kerja, para pembuat kebijakan harus menaikkan pengeluaran pemerintah, mengurangi pajak, dan meningkatkan jumlah uang beredar. Tindakan kebijakan seperti itu menempatkan teori ekonomi makro pada penggunaan terbaiknya dengan mengarah pada perekonomian yang lebih stabil yang menguntungkan semua orang” (Gregory dkk, 2014).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai Produk Domestik Bruto (PDB) minus 3,49% pada kuartal III-2020. BPS melaporkan pertumbuhan PDB tahun 2020 mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDB tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,09% menjadi -2,07% dari tahun 2019 yang mencapai 5,02%. Hal ini mengindikasikan bahwa produksi barang dan jasa sangat menurun akibatnya lesunya permintaan pasar. Penurunan

produksi meningkatkan tingkat pengangguran. Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 7,07%, naik 1,84% dari tahun 2019.

Berbagai langkah represif dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi pasca pandemi. Pemerintah membuat Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Melalui Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah pusat menstimulasi pergerakan ekonomi nasional dengan menumbuhkan perekonomian masing-masing daerah. Penyaluran bantuan sosial, relaksasi pajak dengan pemberian insentif, serta peningkatan penanaman modal dilakukan pemerintah guna merangsang laju pertumbuhan ekonomi agar mampu keluar dari jurang resesi. Tentunya, dalam menjalankan kebijakan ini, pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah yang memiliki wewenang otonomi daerah untuk mengatur dan membuat kebijakan yang relevan dengan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi adalah Kota Malang. (Badan Pusat Statistik, 2023)

Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang dikenal sebagai kota pendidikan. Tentunya, mewabahnya pandemi Covid-19 berdampak besar bagi kondisi sosial ekonomi di Kota Malang. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Malang sempat merosot pada tahun 2020, dan menjadi laju pertumbuhan ekonomi paling rendah dalam rentang waktu 2018-2022.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang, Jawa Timur, dan Indonesia Tahun 2018-2022

Wilayah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Malang	5,72	5,73	-2,26	4,21	6,32
Jawa Timur	5,50	5,53	-2,33	3,56	5,34
Indonesia	5,17	5,02	-2,07	3,70	5,31

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah 2023

Pada Tabel 1 terlihat bahwa pada saat terjadi pandemi, yaitu tahun 2020, seluruh wilayah baik daerah maupun nasional mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Terlihat bahwa Kota Malang mengalami penurunan sebesar 7,99% dari tahun 2019, Provinsi Jawa Timur mengalami

penurunan sebesar 7,86%, dan Indonesia secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 7,09%. Namun, keadaan tersebut perlahan membaik pada dua tahun berikutnya. Meskipun sempat mengalami penurunan yang besar, Kota Malang mampu merubah arah laju pertumbuhan ekonomi menjadi positif dan berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,47% pada tahun 2021. Kenaikan ini melebihi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 5,89% dan Nasional sebesar 5,77%. Dalam kurun waktu lima tahun,

Kota Malang memiliki laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Perubahan positif yang terjadi pada laju pertumbuhan ekonomi, mengindikasikan adanya stimulus yang dilakukan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian agar tidak terus jatuh pada jurang kehancuran ekonomi. Tentunya, hal ini didukung oleh peran pemerintah dalam pengendalian fiskal dan moneter (Badan Pusat Statistik, 2022).

Kebijakan PEN merupakan salah satu alat pengendalian fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diimplementasikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Begitu pula dengan Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang mendorong pemulihan ekonomi melalui penyaluran bantuan sosial melalui dinas terkait. Dana bantuan tersebut bersumber dari APBD Kota Malang dan APBN. Selain itu, Pemerintah Kota Malang juga memberikan insentif pajak berupa penurunan pajak, penghapusan pajak, serta penghapusan denda keterlambatan maupun pelaporan pajak.

Tabel 2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial, Penerimaan Pajak Daerah, dan Investasi Kota Malang Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)

Tahun	Bantuan Sosial	Pajak Daerah	Investasi
2018	-	43.4678,31	16.256,96
2019	-	46.0047,45	17.322,04
2020	820,00	35.1778,77	16.496,33
2021	18.459,16	43.0226,34	16.544,18
2022	12.606,51	49.0804,20	18.422,60

Sumber: Laporan Kota Malang dalam Angka 2020-2023, data diolah 2023

Kemudahan investasi dan penyusunan strategi untuk menarik investor turut dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk menggerakkan kembali roda perekonomian yang

sempat terhenti di kota pendidikan ini. Kebijakan yang dibuat pemerintah perlu dievaluasi keberhasilan atau kegagalannya setelah diimplementasikan, agar secara normatif dapat diketahui efektivitas dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan dapat memberikan arahan yang tepat untuk pemerintah untuk terus melanjutkan kebijakan tersebut, dengan atau tanpa perbaikan, atau justru harus menghentikan kebijakan tersebut dan mengganti dengan kebijakan lain. Selain itu, evaluasi kebijakan diperlukan untuk menilai apakah kebijakan tersebut mampu mengakomodir penyelesaian masalah yang dihadapi dan mengukur kinerja pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan.

Perumusan kebijakan ekonomi perlu mempertimbangkan sasaran yang ingin dicapai, alat kebijakan ekonomi, dan efek yang diharapkan dari penerapan kebijakan tersebut. Dari kebijakan pemulihan ekonomi yang digalakan oleh pemerintah, dapat diketahui bahwa sasaran yang ingin dicapai merupakan sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek tersebut adalah pemulihan ekonomi.

Theo Sulistio berpendapat bahwa, "Masalah utama perekonomian Indonesia pada umumnya bukan terletak pada kebijakan itu sendiri, melainkan pada penerapannya yang sering tidak efisien." Oleh karena itu, implikasi dari kebijakan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang perlu dievaluasi pelaksanaannya, agar dapat diketahui apakah kebijakan ini mampu menjadi solusi dari permasalahan ekonomi yang dihadapi dan mengukur seberapa besar pengaruh kebijakan ini pada pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Terlebih, setiap daerah memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda sehingga kebijakan yang diambil akan disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pengaruh kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan sosial, insentif pajak, dan investasi baik secara parsial maupun terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang?

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengatasi permasalahan ekonomi sebagai dampak dari adanya pandemi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan keadaan ekonomi akan mengalami recovery secara signifikan, sehingga kontraksi ekonomi pada tahun 2020 dapat ditekan pada tahun selanjutnya dan ekonomi nasional dapat bertumbuh positif. Tiga Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam kebijakan pemulihan ekonomi nasional (Purnomoratih, 2020) yaitu:

1. Menambah konsumsi dalam negeri dengan meningkatkan daya beli masyarakat untuk merangsang kenaikan permintaan.
2. Meningkatkan aktivitas usaha dengan memberikan kemudahan dan bantuan bagi para pelaku usaha.
3. Menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter

Program pemulihan ekonomi nasional terdiri dari:

1. PEN-Kesehatan

Penanganan pandemi berfokus terlebih dahulu pada penanganan kesehatan karena merupakan sumber permasalahan utama. Pemerintah memberikan alokasi krusial untuk pengadaan alat tes kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas karantina, laboratorium, hingga pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan. Mendesaknya pengadaan alat dan fasilitas kesehatan didukung oleh adanya insentif pembebasan pajak bagi pengadaan alat-alat kesehatan terkait penanganan Covid-19.

2. PEN-Perlindungan Sosial

Pemerintah memperluas dan mendorong program perlindungan sosial yang diarahkan pada masyarakat pada sektor berpenghasilan rendah seperti pedagang, petani, buruh, nelayan, supir, dan lainnya. Perlindungan sosial diberikan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Tunai, dan Sembako, hingga bantuan tidak langsung seperti diskon tarif listrik dan Kartu Pra Kerja. Perlindungan sosial melalui bantuan ini diharapkan mampu membantu daya beli masyarakat dari kelompok miskin dan rentan agar tingkat

konsumsi tidak terus menurun.

3. PEN-Insentif Usaha

Lesunya aktivitas usaha akibat pandemi, menyebabkan terjadinya penurunan permintaan dan penawaran. Untuk itu, pemerintah memberi dukungan khusus pada dunia usaha, termasuk UMKM. Pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan modal usaha dan pemberian insentif perpajakan untuk menghindari meningkatnya pengangguran akibat pemutusan tenaga kerja dan menjaga keberlangsungan usaha.

4. PEN-Dukungan UMKM

Peran UMKM dalam penyelamatan ekonomi nasional sangat signifikan. UMKM menjadi penyedia lapangan pekerjaan yang cukup besar, sehingga keberlangsungannya pada saat pandemi perlu dijaga. Pemerintah memberikan pinjaman modal kerja, pemberian investasi, subsidi bunga, insentif pajak, serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit.

5. PEN-Pembiayaan Korporasi

Selain memberikan bantuan pada UMKM, pemerintah turut memberikan bantuan pada korporasi padat karya melalui fasilitas restrukturisasi dengan skema penempatan dana. Korporasi padat karya mendapatkan penjaminan kredit modal kerja yang diatur melalui diatur melalui PMK Nomor 98 Tahun 2020.

6. PEN-Pemerintah Daerah & Sektoral Kemertian Lembaga

Dalam melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya sehingga memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp5 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan total Rp8,7 triliun. Selain itu, pemerintah pusat turut memberikan pendanaan bagi pemerintah daerah melalui pinjaman daerah sebesar Rp10 triliun.

Bantuan Sosial

Bantuan sosial dapat berupa bantuan tunai maupun bantuan non tunai. Penyalurannya melalui bantuan dinas terkait yang telah ditetapkan pemerintah. Bantuan sosial

merupakan salah satu realisasi pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi pendapatan nasional. Perbandingan perubahan bantuan sosial dan perubahan pendapatan dapat terlihat pada angka pengganda pengeluaran. Menurut Suparmono (2018), angka pengganda (multiplier) merupakan rasio yang menunjukkan perubahan pendapatan nasional sebagai akibat dari perubahan salah satu atau seluruh variabel pengeluaran pada persamaan pendapatan nasional.

Angka pengganda pengeluaran:

$$kE = \Delta Y / \Delta E$$

Keterangan:

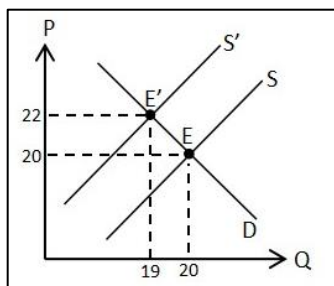
ΔY = Perubahan pendapatan nasional

ΔE = Perubahan pengeluaran pemerintah

Pajak

Menurut Irawan & Suparmoko (2008), pajak merupakan pungutan yang dapat dipaksakan oleh negara kepada wajib pajak tanpa balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Pajak bersifat memaksa dan terutang oleh orang pribadi ataupun badan. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN untuk membiayai pengeluaran pemerintah merupakan salah satu contoh fungsi budgetair pajak. Hingga saat ini, pajak masih menjadi sumber penerimaan terbesar di Indonesia, sehingga pajak menjadi sumber kapital yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pajak menjadi sumber utama penerimaan untuk pembiayaan karena diperoleh secara rutin oleh pemerintah.

Adanya pungutan pajak pada penjualan barang atau jasa, menyebabkan bertambahnya marginal cost sehingga harga jual yang ditawarkan menjadi naik. Pajak akan merubah fungsi penawaran dari $P = F(Q)$ menjadi $P = F(Q) + t$. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran titik keseimbangan pasar seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Grafik Keseimbangan Pasar Sebelum dan Sesudah Pajak

Keterangan:

E = ekuilibrium/keseimbangan pasar

S = supply/penawaran sebelum pajak

S' = supply/penawaran setelah pajak

Q = unit/output

P = harga

Investasi

Menurut Sadono Sukirno (2019), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan investor atau penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi demi menambah kemampuan memproduksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Investasi sebagai fungsi pendapatan nasional berarti bahwa tingkat investasi merupakan fungsi linear dari tingkat pendapatan nasional.

Persamaan pendapatan nasional tiga sektor:

$$Y = C + G + I$$

Keterangan:

C = Konsumsi rumah tangga

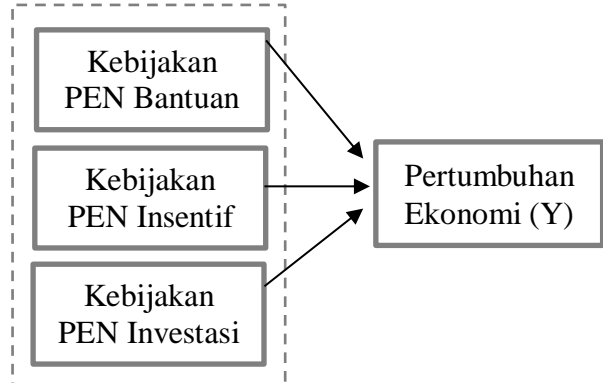
G = Pengeluaran pemerintah

I = Investasi

Pertumbuhan Ekonomi

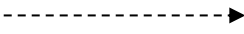
Perhitungan pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk menilai perubahan kondisi ekonomi dari tahun ke tahun. Perubahan ini dapat berupa perubahan yang positif maupun negatif. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Kesejahteraan dapat meningkat apabila output per-kapita meningkat. Dalam literatur ekonomi makro, tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan PDB per kapita. Pertumbuhan ekonomi harus naik lebih tinggi dibandingkan pertambahan penduduk (Pangiuik, 2017).

KERANGKA KONSEPTUAL



Keterangan:

Pengaruh secara parsial = 

Pengaruh secara simultan = 

HIPOTESIS

Hipotesis yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan sosial, insentif pajak, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang baik secara parsial maupun simultan.

- Bantuan sosial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang;
- Insentif pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.
- Investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang; dan
- Bantuan sosial, insentif pajak, dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Pendekatan deskriptif kuantitatif melakukan pengujian hipotesis berdasarkan perhitungan matematika dan statistik. Metode penelitian kuantitatif akan menghasilkan signifikansi hubungan antar variable yang di teliti dan memberikan data yang konkret karena menggunakan analisis statistik.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang pengumpulannya melalui pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik, dinas lain terkait, publikasi umum terkait dan hasil kajian fiskal regional. Sedangkan data waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2013-2022. Waktu yang dipilih untuk penelitian merupakan lini waktu yang mampu memberikan gambaran perbedaan kondisi pada saat sebelum terjadinya pandemi, saat

terjadinya pandemi, dan setelah ditetapkannya pandemi menjadi endemi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variable, yaitu variable bebas (independent variable) dan variable terikat (dependent variable). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bantuan Sosial (X1)

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif. Bantuan sosial diukur menggunakan satuan nilai rupiah.

b. Insentif Pajak (X2)

Insentif pajak adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan berupa pemotongan, penghapusan, pengecualian, dan penangguhan pajak. Insentif pajak diukur menggunakan satuan nilai rupiah.

c. Investasi (X3)

Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan investor atau penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi demi menambah kemampuan memproduksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi diukur menggunakan satuan nilai rupiah.

d. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam satuan rupiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan dinas terkait, serta publikasi umum terkait lainnya yang dilakukan mulai 1 Maret 2023-24 Juni 2023. Dari penelitian ini, diperoleh data sekunder tahun 2013-2022 sehingga jumlah observasi pada penelitian ini adalah 10 seperti pada gambar 3.

Tabel 3. Nilai PDRB, Bantuan Sosial, Penerimaan Pajak, dan Investasi di Kota Malang Tahun 2010-2022 (dalam juta rupiah)

	Mean	Std. Deviation	N
Pertumbuhan Ekonomi	47333079,65	6319447,317	10
Bantuan Sosial	3381,516	6567,03018	10
Pajak	379120,61	81984,33089	10
Investasi	15256,8090	2126,86254	10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, data diolah 2023

Nilai PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010. Nilai PDRB di Kota Malang dalam kurun waktu 2010-2022 cenderung meningkat setiap tahunnya. Penurunan nilai PDRB terjadi pada tahun 2020 dimana pada tahun tersebut adalah tahun awal masuknya virus covid-19 di Indonesia hingga akhirnya ditetapkan menjadi pandemi.

Dalam penelitian ini, kebijakan pemulihan ekonomi melalui bantuan sosial, insentif pajak, dan investasi diuji pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Hasil analisis deskriptif yang diperoleh dari SPSS adalah seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif Data Penelitian

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
Constant	4181842,9	1398159,752	
Bantuan Sosial	138,564	25,126	,144
Pajak	-5,420	4,755	-,070
Investasi	2932,287	186,742	,987

Sumber: Lampiran (diolah)

Berdasarkan Tabel 5. diperoleh model persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$Y = 4181842,9 + 138,564X_1 - 5,42X_2 + 2932,287X_3 + e$$

Persamaan tersebut merupakan hasil regresi dengan menggunakan data tahun 2013-2022, dimana pada kurun waktu tersebut mencakup kondisi sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah pandemi. Dari persamaan tersebut diketahui bahwa apabila nilai X_1 , X_2 , X_3 sama

dengan 0 maka nilai Y adalah sebesar 4.181.842,9.

Tabel 5. Hasil Regresi Linear Berganda

Tahun	PDRB	Bantuan Sosial	Penerimaan Pajak	Investasi
2013	37.547.738,85	129,25	238.499,75	12.007,69
2014	39.724.400,95	1.402,74	278.885,19	12.505,08
2015	41.951.560,00	397,50	316.682,89	13.456,21
2016	44.303.900,96	-	374.641,67	14.330,20
2017	46.824.750,93	-	414.961,53	15.226,80
2018	49.500.825,23	-	434.678,31	16.256,96
2019	52.334.750,27	-	460.047,45	17.322,04
2020	51.154.530,52	820,00	351.778,77	16.496,33

Sumber: Lampiran (diolah)

Pengaruh bantuan sosial, insentif pajak, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Dari hasil uji F pada Gambar 6, terlihat bahwa nilai *p-value* atau signifikansi (sig.) menunjukkan angka 0,000. Dalam Uji F, apabila nilai *p-value* < α maka hipotesis diterima dan apabila nilai *p-value* > α maka hipotesis ditolak. Nilai α pada penelitian ini adalah 0,005. Dengan demikian, hipotesis diterima karena nilai sig. 0,000 < 0,05 dan hasil ini menunjukkan bahwa variabel bantuan sosial, insentif pajak, dan investasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3,583E+14	3	1,194E+14	629,339	,000 ^b
Residual	1,139E+12	6	1,898E+11		
Total	3,594E+14	9			

Sumber: Lampiran (diolah)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* secara parsial dan menguji hipotesis dimana ketentuannya apabila nilai t-hitung > t-tabel dengan sig. < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Nilai t-tabel dalam penelitian ini adalah 2,306 (df: 8, α : 0,05). Hasil uji t dalam penelitian

ini ditampilkan apada Gambar 7.

Tabel 7. Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	41818 42,9	1398159,7 52		2,99 1	,024
Bantuan Sosial	138,5 64	25,126	,144	5,51 5	,001
Pajak	-5,420	4,755	-,070	- 1,14 0	,298
Investasi	2932, 287	186,742	,987	15,7 02	,000

Sumber: Lampiran (diolah)

Berdasarkan dari Tabel 7 dapat dinyatakan bahwa:

a. Pada variabel bantuan sosial, nilai t-hitung adalah $5,515 > 2,306$ dengan sig. $0,001 < 0,05$ maka kebijakan PEN melalui bantuan sosial berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 bantuan sosial akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebanyak 138,564.

b. Pada variabel insentif pajak yang dihitung menggunakan nilai penerimaan pajak daerah, nilai t-hitung adalah $1,140 < 2,13185$ dengan sig. $0,298 > 0,05$ maka pajak tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 pajak akan menurunkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebanyak 5,420 dan sebaliknya, penurunan pajak sebanyak 1000 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.420, sehingga kebijakan PEN melalui pemberian insentif pajak tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Pada variabel investasi, nilai t-hitung adalah $15,702 > 2,306$ dengan sig. $0,000 < 0,05$ maka kebijakan PEN melalui investasi berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebanyak 2932,287.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan sosial secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang

2. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui insentif pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang

3. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang

4. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan sosial, insentif pajak, dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang

Saran

a. Bagi pembaca, agar menjadi sumber pengetahuan bagaimana pengaruh kebijakan pemulihan ekonomi melalui bantuan sosial, insentif pajak, dan investasi di Kota Malang. Ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya pemulihan ekonomi.

b. Bagi pemerintah, agar lebih memaksimalkan kebijakan pemulihan ekonomi agar rangsangan bagi pertumbuhan ekonomi lebih baik. Selain itu, kebijakan pemberian insentif pajak daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu dikaji ulang, baik dari prosedur permohonannya maupun besaran pengurangan tarifnya. Prosedur pemanfaatan fasilitas keringanan pajak perlu dipermudah agar tujuan kebijakan tersebut tercapai dengan baik.

c. Bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan metodologi atau pendekatan analisis yang dapat digunakan untuk memperluas pemahaman mengenai pengaruh kebijakan pemulihan ekonomi nasional di wilayah regional dengan variabel-variabel lain yang memberikan hasil uji yang lebih baik. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan data time series dalam satuan jangka pendek seperti kuartal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, C. (2020, April 1). *Pemkot Malang Pertimbangkan Keringanan Pajak Daerah*. <https://surabaya.bisnis.com/read/20200401/531/1221177/pemkot-malang-pertimbangkan-keringanan-pajak-daerah>
- Asryad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kota Malang Dalam Angka 2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kota Malang Dalam Angka 2023* (L. Alfiah, Ed.). BPS

Kota Malang.

- Febrianto, V. (2020). *Bapenda Kota Malang Beri Keringanan Pajak Untuk Pelaku Usaha*. <https://www.antaranews.com/berita/1639654/bapenda-kota-malang-beri-keringanan-pajak-untuk-pelaku-usaha>
- Gregory, M., Quah, E., & Wilson, P. (2014). *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Asia* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2019). *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Y. S. Hayati, Ed.). Rajawali Pers.
- Ilmy, I. (2022). Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Pusat Tahun 2020: Sebuah Tinjauan. *Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2.
- Irawan, & Suparmoko. (2008). *Ekonomi Pembangunan* (6th ed.). BPPE.
- Mankiw, N. G. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro* (7th ed.). Salemba Empat.
- Pangiuik, A. (2017). Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Studi Tahun 2012-2015). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN STS Jambi*, 1(1), 2–20.
- Purnomoratih, Y. (2020). *Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Menopang Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan*. 1–16.
- Sasongko, D. (2020, August 3). *Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2019). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Suparmono. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.
- Tri Basuki, A., & Prawoto, N. (2019). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Rajawali Pers.
- Vivian, A. (2022, August). *Insentif Pajak Tahun 2022*. <https://www.pajakku.com/read/63083f73a9ea8709cb18bd4e/Insentif-Pajak-Tahun-2022>
- Widodo, U. P. W., & Ardhiani, M. R. (2022). Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Owner*, 6(2). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.833>